ADIJAYA
Jurnal Multidisiplin
https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj
Vol. 03, No. 06, 2025, Hal. 938-945
E-ISSN : 2964-7606

Penerapan al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam Kebijakan Ibadah saat Pandemi Covid-19 di Indonesia

Jesiana Naisela Putri[1], Ferita Maharani[2], Fifi Tri Ariani[3], Nawa Udlma Aizama[4], Restu Dimas Surya Pradipta[5], Baidhowi[6].

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah.
E-mail Korespondensi: nawaudlmaaizama593@students.unnes.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan ibadah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kesulitan (masyaqqah) menjadi dasar kemudahan (taysir) dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan keagamaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ibadah pada masa pandemi, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020, merupakan penerapan prinsip al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir karena memberikan keringanan (rukhsah) secara proporsional tanpa menghapus kewajiban ibadah. Selain itu, penerapan kaidah ini juga memberikan kontribusi dalam menciptakan kemudahan dan menjaga keselamatan umat di tengah kondisi darurat. Dari perspektif hukum positif, kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan jiwa. Implementasi ini menunjukkan sinergi antara norma agama dan kebijakan negara dalam memberikan kemudahan beribadah di masa darurat.

Kata kunci Masyaqqah; SE; ibadah; Covid-19.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Islamic legal maxim al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir in worship policies during the Covid-19 pandemic in Indonesia. This maxim emphasizes that every hardship (masyaqqah) serves as the basis for ease (taysir) in Islamic law. The research applies a normative juridical method through a literature study of Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant religious policies. The results indicate that worship policies during the pandemic, such as the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 14 of 2020 and the Ministry of Religious Affairs Circular No. 6 of 2020, represent an application of the al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir principle by providing proportional concessions (rukhsah) without eliminating the obligation of worship. Moreover, the

application of this principle contributes to creating convenience and ensuring the safety of the community in emergency conditions. From the perspective of positive law, these policies align with Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which guarantees freedom of religion and the protection of life. This implementation demonstrates the synergy between religious norms and state policies in facilitating worship during emergencies.

Keywords ***Masyaqqah; Circular Letter; worship; Covid-19.***

1. PENDAHULUAN

Ibadah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan apa pun. Namun, penerapannya sering menghadapi persoalan serius ketika umat berada dalam kondisi darurat, seperti bencana alam maupun pandemi. Situasi darurat tersebut menimbulkan hambatan baru bagi pelaksanaan ibadah, terutama yang melibatkan kerumunan besar seperti salat berjamaah, salat Jum'at, dan ibadah Id. Dalam konteks inilah kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir menjadi sangat relevan, karena prinsip ini menegaskan bahwa kesulitan dapat melahirkan keringanan hukum, sehingga kewajiban ibadah tetap terlaksana tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar.1 Kaidah tersebut selaras dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah) yang mengutamakan penjagaan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal, keturunan, serta harta.

Dalam penerapannya keagamaan di Indonesia, pandemi telah memunculkan dinamika regulasi dan fatwa, yang memberikan pedoman bagi umat untuk tetap menjalankan ibadah dengan memperhatikan aspek keselamatan jiwa.3 Fatwa tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah pada Masa Pandemi.4 Dari perspektif hukum positif, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan beragama, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum agar umat dapat tetap beribadah meski dalam kondisi darurat.

Kajian akademik sebelumnya telah menyoroti persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Nafi'ah, Kurniawati, dan Kaha (2021) menegaskan bahwa fatwa MUI pada masa pandemi merupakan produk ijtihad yang berfungsi sebagai solusi hukum sekaligus panduan umat.6 Penelitian Mutakabbir dan Said (2021) menekankan bahwa fatwa tersebut lahir melalui proses istinbath yang mempertimbangkan maqashid syariah, khususnya aspek perlindungan jiwa sehingga hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif.7 Penelitian lain juga menemukan adanya resistensi masyarakat terhadap perubahan tata cara ibadah, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya pemahaman atas maqashid syariah yang mendasari fatwa tersebut.8 Selain itu, beberapa penelitian mengkaji secara khusus relevansi kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kerangka kebijakan publik keagamaan, namun umumnya masih bersifat deskriptif dan belum menempatkannya secara utuh dalam bingkai hukum positif Indonesia.9

Dari telaah literatur tersebut tampak bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi fatwa MUI dan aspek praktis pelaksanaan ibadah, tetapi belum secara komprehensif mengkaji integrasi antara kaidah fikih al- Masyaqqah Tajlib al-Taysir, dan legitimasi kebijakan publik keagamaan di Indonesia. Di sinilah kebaruan kajian ini, yakni menghadirkan analisis normatif tentang reaktualisasi kaidah fikih tersebut dalam kebijakan ibadah pada kondisi darurat dengan menempatkannya pada hukum positif nasional.

Dari perspektif normatif, reaktualisasi ini memiliki landasan yang kuat. Dalam hukum Islam, prinsip kemudahan ditegaskan dalam firman Allah: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. al-Baqarah: 185), “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. al-Baqarah: 286), dan “Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan” (QS. al-Hajj: 78).10 Sedangkan dalam hukum positif, dasar pijakannya antara lain Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, SE Kementerian Agama No. 6 Tahun 2020, dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Ketiganya menunjukkan adanya sinergi antara norma agama dan kebijakan negara dalam menjaga keberlangsungan ibadah di tengah kondisi darurat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana reaktualisasi kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dapat diterapkan dalam kebijakan ibadah pada kondisi darurat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan kaidah tersebut secara normatif sehingga dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan hukum Islam kontemporer sekaligus relevan dengan kebijakan publik keagamaan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan ibadah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam memberikan kontribusi menciptakan kemudahan pada masa kondisi darurat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif ini meliputi peninjauan teori dan konsep, serta analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian dan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an. Selain itu, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan berbasis undang-undang (statute approach) sebagai salah satu bentuk pendekatan normatif yang bertujuan untuk menelaah sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya, penelitian ini juga menerapkan pendekatan hukum konseptual dengan meneliti norma-norma dan prinsip-prinsip Islam yang tercantum pada Al-Qur’an serta hadist yang saling terhubung dengan fenomena hukum yang dikaji, khususnya dalam konteks kebijakan ibadah pada kondisi darurat di Indonesia. Analisis terhadap data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berorientasi pada pemahaman makna, konteks sosial, dan nilai-nilai budaya yang melingkupi hukum. Pendekatan kualitatif dalam bidang ilmu hukum digunakan untuk menafsirkan serta menjelaskan keterkaitan antara norma-norma dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan secara mendalam. Melalui pengkajian terhadap norma-norma dan peraturan hukum yang relevan, metode ini menghasilkan pemahaman yang lebih terperinci dan kontekstual mengenai reaktualisasi kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan ibadah pada kondisi darurat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penggunaan Prinsip Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir dalam Hukum Islam untuk Menerapkan Kebijakan Ibadah Selama Pandemi

Kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir yaitu prinsip penting dalam hukum Islam yang memberikan kelonggaran ketika pelaksanaan syariat menimbulkan kesulitan yang nyata. Secara etimologis, masyaqqah berarti kesulitan, sementara taysir bermakna kemudahan, sehingga kaidah ini menegaskan bahwa kondisi sulit dapat menjadi dasar diberlakukannya keringanan (rukhsah) dalam ibadah. Landasan normatifnya tampak dalam Al-Baqarah [2]:185 "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian" serta hadis Nabi, "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah," (HR. al-Bukhari).

Meski demikian, tidak semua kesulitan dapat dijadikan alasan rukhsah. Masyaqqah yang dapat menghasilkan taysir ialah kondisi luar biasa yang membawa bahaya atau mudarat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi termasuk dalam kategori kesulitan yang membolehkan adanya kemudahan hukum. Penerapan prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kondisi kontemporer tanpa mengabaikan nilai dasar syariat.

Pandemi Covid-19 menjadi contoh nyata penerapan kaidah tersebut. Aktivitas ibadah berjamaah seperti salat Jumat, tarawih, atau pelaksanaan haji berpotensi besar menjadi media penularan virus. Padahal salah satu tujuan utama maqashid al-shari'ah, yaitu perlindungan nyawa (hifz al- nafs), sangat relevan pada situasi ini. Sebagai respons, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, dan organisasi Islam mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan cara beribadah, seperti memperbolehkan salat Zuhur di rumah sebagai pengganti salat Jumat, menunda keberangkatan haji, membatasi jamaah, serta mewajibkan protokol kesehatan. Kebijakan ini merupakan wujud penerapan rukhsah sebagai mekanisme syariat yang memungkinkan ibadah tetap terlaksana sesuai kemampuan umat pada kondisi yang sulit.Keringanan ini bukanlah bentuk pengurangan kewajiban, melainkan adaptasi teknis untuk mencegah mudarat yang lebih besar.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah selama Wabah Covid-19 secara tegas memperbolehkan umat Islam yang berada di wilayah berisiko tinggi untuk tidak menghadiri salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di rumah. Kebijakan ini secara eksplisit menempatkan hifz al-nafs sebagai prioritas syariat sesuai prinsip al- Masyaqqah Tajlib al-Taysir. Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 mengatur penyesuaian praktik ibadah di masa pandemi, antara lain kewajiban memakai masker, penerapan jaga jarak, serta ketentuan pengelolaan jenazah korban Covid-19. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 kemudian memberikan pedoman operasional di tempat ibadah meliputi pembatasan jumlah jamaah, ketentuan zonasi wilayah, dan anjuran beribadah di rumah. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan korelasi langsung antara prinsip taysir (kemudahan) dan kondisi masyaqqah (kesulitan) yang dialami masyarakat.

Pembatasan aktivitas keagamaan pada masa pandemi memiliki dasar hukum yang jelas. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, namun situasi darurat memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur kegiatan publik demi melindungi keselamatan. Pasal 28A dan 28H menegaskan hak atas hidup dan kesehatan sebagai prioritas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan negara melindungi masyarakat dari bencana, termasuk bencana non-alam seperti pandemi. Dengan demikian, penerapan prinsip al- Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan keagamaan memiliki legitimasi ganda, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum nasional.

Penelitian Sahari (2021)18 mengungkap bahwa implementasi fatwa dan edaran tersebut mendapat respons beragam di masyarakat. Sebagian pengelola masjid memilih menangguhkan salat berjamaah sepenuhnya, sementara sebagian lainnya tetap melaksanakannya dengan pembatasan tertentu. Fathoni (2021)19 juga menegaskan bahwa kebijakan MUI selama pandemi merupakan hasil ijtihad yang berpijak pada prinsip kemudahan syariah, sedangkan Zulhamdi (2020)20 menyatakan bahwa al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir berfungsi sebagai kaidah universal dalam merespons setiap bentuk kesulitan umat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini relevan secara teologis dan sejalan dengan prinsip HAM serta hukum nasional yang menekankan perlindungan jiwa dan kebebasan beragama. Sifatnya yang adaptif membuat al Masyaqqah Tajlib al Taysir dapat diterapkan pada berbagai keadaan darurat seperti letusan gunung merapi, banjir, atau gempa. Kaidah ini memberi dasar syariah untuk menyesuaikan ibadah, termasuk salat di pengungsian, penghentian kegiatan bersama, atau penyederhanaan tuntunan sesuai kemampuan. Kaidah ini berfungsi sebagai landasan yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi kondisi sulit.

Kontribusi Penerapan Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir terhadap Kemudahan Ibadah di Masa Pandemi dan Bencana

Penerapan kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan ibadah selama pandemi dan kedaruratan bencana memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya kemudahan bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Surat Edaran Kementrian Agama yang membatasi aktivitas keagamaan di masjid maupun tempat ibadah lain pada dasarnya bukan bentuk pengurangan kewajiban, melainkan penerapan prinsip rukhsah untuk melindungi umat dari bahaya. Dengan adanya rukhsah ibadah, umat dapat tetap melaksanakan kewajiban agamanya tanpa harus terbebani oleh situasi darurat yang mengancam keselamatan. Kebolehan mengganti shalat Jumat dengan shalat Zuhur di rumah21, beribadah dengan protokol kesehatan, hingga keringanan pelaksanaan ibadah haji menunjukkan bahwa prinsip syariat benar-benar hadir untuk mempermudah kehidupan umat.

Lebih jauh, penerapan kaidah ini juga berkontribusi terhadap tercapainya tujuan syariat Islam (maqasid al-shariah), khususnya hifz al-din (agama)22 dan hifz al-nafs (jiwa). hifz al-din tetap terjaga karena umat dapat melaksanakan shalat dan ibadah lain meskipun dengan cara yang dimodifikasi sesuai kondisi darurat, sedangkan hifz al-nafs terlindungi karena adanya pembatasan kerumunan dan penerapan protokol kesehatan dalam beribadah sehingga tercipta keseimbangan antara kewajiban spiritual dan keselamatan fisik. Dalam konteks bencana alam, kemudahan berupa salat di tempat pengungsian dengan memanfaatkan fasilitas ibadah darurat

memberi ruang bagi korban untuk tetap beribadah dalam keterbatasan maupun penghentian sementara kegiatan keagamaan kolektif. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak memberatkan, justru hadir sebagai rahmat dengan memberi kemudahan dalam segala kondisi dan kaidah ini meneguhkan bahwa tujuan syariat tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup umat.

Kebijakan berbasis prinsip kemudahan memberikan rasa tenteram, karena umat memahami bahwa keringanan dalam beribadah adalah bagian dari ketaatan, bukan pelanggaran. Umat tidak perlu merasa bersalah ketika tidak bisa melaksanakan ibadah secara normal, sebab rukhsah justru menegaskan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Dengan cara ini, kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir bukan hanya menjadi perangkat hukum Islam, melainkan prinsip hidup yang membuat umat tetap teguh beribadah meskipun berada dalam kondisi penuh keterbatasan.

KESIMPULAN

Kaidah fikir al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir merupakan kaidah krusial dalam hukum yang memberikan kelengkapan ketika pelaksanaan syariat menimbulkan kesulitan yang nyata. Kesulitan yang dimaksud adalah kondisi di luar kebiasaan yang dapat membawa bahaya bagi individu maupun masyarakat. Keadaan darurat, bencana alam, atau pandemi termasuk kategori Masyaqqah. Contoh nyata penerapan kaidah ini dapat dilihat pada saat pandemi Covid-19, aktivitas ibadah berjamaah yang berisiko menularkan penyakit, yang membuat Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kebijakan mengenai salat zuhur di rumah, menunda keberangkatan haji, membatasi jumlah jamaah di masjid dan mewajibkan protokol kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan wujud penerapan rukhsah dalam Hukum Islam.

Kaidah ini tidak hanya sekedar bersifat teologis, melainkan juga konstitusional. Kaidah kemudahan dalam Hukum Islam selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional. Kaidah kemudahan dalam Hukum Islam ini juga bersifat adaptif dan konsentrasi, sehingga dapat dilakukan pada saat keadaan darurat lainnya, seperti gempa bumi, banjir, atu letusan gunung berapi. Implementasi kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir dalam kebijakan ibadah di masa pandemi dan keadaan darurat menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid al-shariah), khususnya untuk melindungi agama (hifz al-din) serta jiwa (hifz al-nafs). Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mempermudah dan membawa berkah serta rahmat, bukan untuk menambah beban, dan memastikan bahwa ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dalam berbagai keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adityarani, N. W. (2025). Tujuan dan asas-asas hukum Islam. Dalam Filsafat Hukum dalam Islam (hlm. 86). Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal/sumber lainnya

Akbar, M. N. (2022). Implementasi kaidah al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir dalam ibadah. Jurnal Tinta, 4(2), 27–38.

Andi, N. A. (2024). Menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (Disertasi doktor, IAI STIBA Makassar).

Andrizal, A., Nelli, J., & Gani, E. (2023). Konstruksi kaidah fiqhiyyah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dalam masalah hukum sholat Jumat di tengah pandemi Covid-19. Jotika Research in Business Law, 2(1), 7–18.

Aswad, A. M. (2021). Dinamisasi hukum Islam: Analisis fatwa MUI masa pandemi. Palita Journal of Social Religion Research, 6(2), 145–160.

Dalimunthe, M. R. (2021). Pandangan MUI Kota Binjai terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 2(1), 45–56.

Fathoni, A. (2021). Fatwa MUI tentang ibadah di masa pandemi COVID-19: Analisis kaidah fiqhiyyah. Jurnal Studi Islam, 5(1), 33–34.

Jotika, A. (2020). Kaidah fikih dalam konteks kekinian. Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 22–34.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2020). Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah pada Masa Pandemi.

Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah.

Mutakabbir, A., & Said, R. A. R. (2021). Dinamisasi hukum Islam: Analisis Fatwa MUI masa pandemi. Palita Journal of Social Religion Research, 6(2), 200–212.

Nafi'ah, Z. N., Kurniawati, D. A., & Kaha, H. (2021). Analisis Fatwa MUI tentang ibadah di masjid selama pandemi. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 3(2), 101–112.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A, 28H, dan 29 ayat (2).

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Sahari. (2021). Implementasi al-Masyaqqoh al-Tajlibu al-Taisyiir di tengah pandemi COVID-19. Jurnal Aqlam, 6(2), 139–151.

Zulhamdi. (2020). Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Jurnal Syarah, 1(2), 105–112.

Zulhamdi. (2021). Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan).

Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 10(2), 235–252.